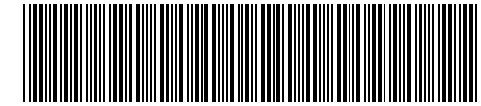




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408902/2021**



DS:9176-0262-0560-2897

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| 3. Provinsi | : (25) | PAPUA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408902) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA |
| Sebesar | : Rp. 1.825.600.000 | (SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	1.825.600.000
Rp.	1.825.600.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.825.600.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN JAYAPURA | (063) Rp. | 1.825.600.000 |
|------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.825.600.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			1.825.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase peningkatan PNBP Administasi Hukum Umum di wilayah			
		2. 01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
		3. 02	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3,00	Rekomendasi Kebijakan	566.850.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi penyelesaian permasalahan kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	566.850.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	383.269.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	2,00	kegiatan	383.269.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7,00	layanan	576.457.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	7,00	layanan	576.457.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	78.764.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan perkara pada kantor wilayah	1,00	Perkara	78.764.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2,00	Lembaga	220.260.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	2,00	Lembaga	220.260.000

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

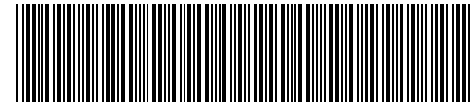
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021

I B. SUMBER DANA



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (408902) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	1.825.600.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	1.825.600.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408902	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	-	1.825.600	-	-	-	1.825.600		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.825.600	-	-	-	1.825.600		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.825.600	-	-	-	1.825.600		
5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	566.850	-	-	-	566.850	25 . 51	
04	PNBP	-	566.850	-	-	-	566.850	063	
5251.AEA	Koordinasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	383.269	-	-	-	383.269	25 . 51	
04	PNBP	-	383.269	-	-	-	383.269	063	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	576.457	-	-	-	576.457	25 . 51	
04	PNBP	-	576.457	-	-	-	576.457	063	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	78.764	-	-	-	78.764	25 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	78.764	-	-	-	78.764	063	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	220.260	-	-	-	220.260	25 . 51	
04 PNBP		-	220.260	-	-	-	220.260	063	
JUMLAH		-	1.825.600	-	-	-	1.825.600		

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

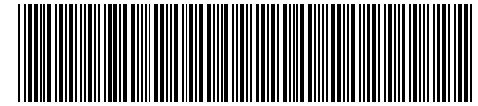
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408902	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	305.955	97.825	269.631	179.930	209.215	268.931	147.086	253.475	63.552	30.000	1.825.600
		BELANJA BARANG	0	0	305.955	97.825	269.631	179.930	209.215	268.931	147.086	253.475	63.552	30.000	1.825.600
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	0	305.955	97.825	269.631	179.930	209.215	268.931	147.086	253.475	63.552	30.000	1.825.600
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	305.955	97.825	269.631	179.930	209.215	268.931	147.086	253.475	63.552	30.000	1.825.600

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021
IV A. B L O K I R**



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408902] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

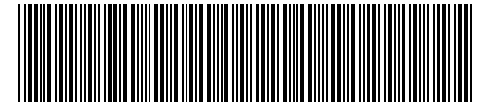
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:9176-0262-0560-2897

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408902] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001